

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pariwisata alam baik secara global maupun di Indonesia telah menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Secara global, sektor pariwisata berkontribusi besar terhadap perekonomian dunia, dengan peningkatan jumlah wisatawan internasional setiap tahunnya (Esparza-Huamanchumo et al., 2024). Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Pertumbuhan pariwisata mendorong terbukanya lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, hingga berkembangnya infrastruktur pendukung di berbagai daerah. Menurut A.Yoeti (1996), pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi, melainkan juga sebagai katalis pembangunan wilayah. Sejalan dengan itu, Nijkamp (2000) menegaskan bahwa pariwisata harus dikembangkan dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar keberlanjutannya dapat terjamin.

Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki potensi pariwisata alam cukup tinggi dan beragam. Kecamatan Pangalengan, sebagai salah satu wilayah unggulannya, dikenal dengan daerah pegunungan yang sejuk, hamparan perkebunan teh yang luas, danau yang eksotis, serta aliran sungai yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Dari berbagai potensi tersebut, Sungai Palayangan menjadi salah satu destinasi utama dengan atraksi arung jeram (*rafting*) yang menawarkan jeram permanen dan debit air stabil, sehingga kegiatan wisata dapat dilakukan sepanjang tahun tanpa bergantung pada musim. Keunggulan ini menjadikan Sungai Palayangan sebagai lokasi strategis untuk wisata petualangan berbasis alam. Selain itu, kawasan ini juga mengalami perkembangan pesat dengan hadirnya wisata *glamping* (glamour camping) yang memadukan kenyamanan modern dengan suasana

Najwa Shafa Shabirah, 2025

ANALISIS KEPENTINGAN STAKEHOLDER PADA PENGEMBANGAN PARIWISATA ALAM DI KAWASAN SUNGAI PALAYANGAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

alam terbuka, sehingga memperluas segmen pasar wisatawan. Kombinasi atraksi alam, petualangan, dan rekreasi keluarga tersebut menjadikan Sungai Palayangan tidak hanya menarik bagi wisatawan lokal, tetapi juga mampu menarik perhatian wisatawan mancanegara sebagai destinasi unggulan di wilayah Pangalengan.

Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan pariwisata di Sungai Palayangan hingga saat ini belum berjalan secara optimal. Permasalahan utama yang dihadapi adalah lemahnya koordinasi dan sinergi antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan wisata. Belum adanya forum kolaboratif yang mampu menyatukan visi dan misi bersama menyebabkan setiap stakeholder cenderung berjalan dengan orientasi masing-masing. Pemerintah lebih berfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan infrastruktur, pelaku usaha berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi serta keberlanjutan bisnis, sementara masyarakat lokal menekankan pentingnya pelestarian lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara adil, serta akses terhadap ruang hidup mereka (Oktavia & ., 2015). Perbedaan orientasi dan prioritas ini menimbulkan ketimpangan peran antar stakeholder, yang tidak jarang berujung pada potensi konflik dalam pengelolaan kawasan. Situasi ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di Sungai Palayangan membutuhkan suatu mekanisme kolaboratif yang mampu menjembatani kepentingan beragam pihak, sehingga tercapai keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berbagai kendala dan konflik seringkali muncul dalam pengembangan pariwisata alam, terutama saat berkaitan dengan perbedaan kepentingan antar *stakeholder* (Reed et al., 2009).



Gambar 1. 1 Konflik antar pemangku kepentingan pada Sungai Mekong Kamboja

*Sumber: Cambodia Starts Work on Canal Linking Mekong River to Sea |
Environment News | Al Jazeera (2024)*

Gambar 1.1 menjelaskan salah satu contoh konflik dalam pengembangan pariwisata khususnya di kawasan sungai yakni permasalahan antar pemangku kepentingan pada Sungai Mekong, Kamboja dimana pemerintah dan pelaku usaha ingin melakukan sebuah pembangunan fasilitas wisata yang sering kali mengabaikan dampak ekologis terhadap sungai, seperti pencemaran air maupun kerusakan habitat. Sementara itu masyarakat lokal yang mengandalkan sungai ini sebagai mata pencahariannya sehingga masyarakat lokal merasa keberadaan mereka terpinggirkan dan lingkungannya mereka terganggu oleh pembangunan pariwisata tersebut (Rashid, 2020).

Najwa Shafa Shabirah, 2025

ANALISIS KEPENTINGAN STAKEHOLDER PADA PENGEMBANGAN PARIWISATA ALAM DI KAWASAN SUNGAI PALAYANGAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dalam konteks teori, *stakeholder* merupakan pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dan dipengaruhi oleh keberadaan suatu program, kebijakan, atau kegiatan pembangunan. Freeman (1984) mendefinisikan *stakeholder* sebagai kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi, sehingga keberadaan mereka tidak dapat diabaikan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dalam sektor pariwisata, *stakeholder* memiliki peran yang beragam dan saling terkait. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan pembuat kebijakan yang mengatur arah pembangunan, pelaku usaha berperan sebagai penyedia layanan serta penggerak ekonomi, sedangkan masyarakat lokal sebagai pihak yang menjaga keberlanjutan lingkungan, melestarikan budaya, sekaligus menjadi penerima dampak langsung dari aktivitas pariwisata. Namun, perbedaan kepentingan di antara para pihak ini seringkali menimbulkan ketidakseimbangan peran. Pemerintah cenderung berorientasi pada pencapaian target pembangunan dan peningkatan pendapatan daerah, pelaku usaha berfokus pada keuntungan ekonomi, sementara masyarakat lebih menitikberatkan pada keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan lokal. Ketidakseimbangan tersebut berpotensi melahirkan konflik kepentingan, yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat menghambat keberlanjutan pariwisata. Sejalan dengan hal ini, Reed et al., (2009) menegaskan bahwa analisis *stakeholder* menjadi instrumen penting untuk memahami kepentingan, pengaruh, serta hubungan antar pihak, sehingga dapat dirumuskan strategi kolaboratif yang lebih efektif. Dengan demikian, pengelolaan pariwisata berbasis *stakeholder* tidak hanya menyatukan perbedaan kepentingan, tetapi juga memastikan terciptanya tata kelola pariwisata yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dinamika hubungan antar *stakeholder* dalam pengelolaan pariwisata tidak selalu berjalan baik, melainkan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan di masing-masing destinasi. Rahmawati & Marom (2021) menemukan bahwa hubungan antar *stakeholder* dalam

pengelolaan wisata alam masih cenderung lemah, terutama pada aspek komunikasi dan koordinasi. Lemahnya komunikasi ini berimplikasi pada munculnya potensi konflik, misalnya terkait kewenangan, distribusi manfaat ekonomi, maupun keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan strategis. Sedangkan dalam penelitian Bilqis (2024) menunjukkan hasil berbeda, di mana hubungan antar *stakeholder* justru bersifat saling melengkapi dengan tingkat kerja sama yang cukup baik. Meskipun demikian, tantangan koordinasi tetap menjadi isu yang perlu diatasi, khususnya dalam menjaga keseimbangan peran antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal. Perbedaan temuan dari kedua penelitian ini memperlihatkan bahwa dinamika *stakeholder* sangat kontekstual; keberhasilan atau kegagalan kolaborasi antar pihak sangat bergantung pada mekanisme komunikasi, pola distribusi manfaat, serta struktur kelembagaan yang terbangun di suatu destinasi. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai hubungan kepentingan dan pengaruh *stakeholder* perlu dilakukan pada setiap konteks pariwisata, termasuk di kawasan Sungai Palayangan, untuk memahami secara spesifik potensi konflik maupun peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan.

Peran pemangku kepentingan (*stakeholder*) pada pengembangan pariwisata alam berperan sangat penting dalam kontribusi pengembangan suatu objek wisata. Secara umum terdapat tiga pemangku kepentingan pariwisata yang berperan penting dalam suatu pengembangan objek wisata, yakni pemerintah, pihak swasta dan masyarakat oleh karena itu setiap pemangku kepentingan tentunya memiliki peran yang berbeda agar setiap pengembangan objek wisata di suatu daerah dapat terlaksana dengan baik (Handayani & Warsono, 2017). Pemerintah memiliki tugas dan kewenangan untuk membuat kebijakan dan perencanaan yang sistematis untuk menyediakan dan membangun infrastruktur pendukung pada kegiatan pariwisata dan meningkatkan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja pada sebuah destinasi wisata. Sedangkan pihak swasta / pelaku usaha memiliki peran dalam menyediakan sarana pendukung dalam pariwisata seperti, akomodasi, restoran, atraksi dan

transportasi, dan masyarakat berperan sebagai pemilik serta pengelola yang dapat menjadi bagian dari atraksi wisata yang menarik wisatawan dengan memperkenalkan kebudayaan dan keunikan atau ciri khas dari objek wisata tersebut yang tentunya berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan (A.Yoeti, 1996).

Pada penelitian sebelumnya sebagian besar berfokus pada potensi wisata, aspek lingkungan, serta teknis pengelolaan destinasi, misalnya pada aspek daya tarik alam, peluang ekonomi, hingga dampak ekologi dari kegiatan wisata. Namun, kajian yang secara khusus membahas kepentingan dan pengaruh *stakeholder* dalam pengembangan kawasan ini masih sangat terbatas. Padahal, pemahaman yang mendalam mengenai kepentingan dan tingkat pengaruh *stakeholder* sangat penting untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana hubungan antar pihak berlangsung. Melalui analisis tersebut dapat diidentifikasi potensi konflik yang mungkin timbul, ketidakseimbangan peran antar aktor, serta peluang kolaborasi yang dapat diperkuat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan. Lebih jauh lagi, analisis kepentingan dan pengaruh dapat menjadi landasan dalam merumuskan strategi kolaboratif yang tidak hanya menekankan pada aspek teknis pengelolaan, tetapi juga mempertimbangkan keadilan distribusi peran dan manfaat antar *stakeholder*. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola pariwisata Sungai Palayangan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi model pengelolaan destinasi serupa di daerah lain.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata Sungai Palayangan dengan menggunakan matriks pengaruh–kepentingan sebagai instrumen utama. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi, peran, kepentingan, serta tingkat pengaruh masing-masing *stakeholder* dalam proses pengelolaan kawasan wisata. Hal ini peneliti telah memilih judul “Analisis Kepentingan *Stakeholder* dalam Pengembangan Pariwisata Alam di Kawasan Sungai Palayangan”, judul tersebut perlu

diambil karena hal tersebut dinilai cukup penting untuk dilakukan agar dapat meninjau kembali terkait peran *stakeholder* serta penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk menentukan kebijakan dalam pengembangan pariwisata alam di kawasan Sungai Palayangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata alam di kawasan Sungai Palayangan?
2. Bagaimana klasifikasi *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata alam di Sungai Palayangan berdasarkan matriks pengaruh dan kepentingan?
3. Bagaimana hubungan antar *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata alam di Sungai Palayangan?
4. Bagaimana strategi yang tepat untuk meningkatkan peran dan kolaborasi *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata alam di Sungai Palayangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi peran masing masing *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan pariwisata alam di kawasan Sungai Palayangan.
2. Untuk mengetahui klasifikasi *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata alam di Sungai Palayangan berdasarkan matriks pengaruh dan kepentingan.
3. Untuk menganalisis hubungan antar *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata alam di Sungai Palayangan.

4. Untuk merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan peran dan kolaborasi *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata alam di Sungai Palayangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti diharapkan penelitian ini dapat menjadi wadah untuk mengaplikasikan secara nyata ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam konteks pengembangan pariwisata. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai peran *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata alam di Sungai Palayangan
- b. Bagi Pengelola dan Instansi dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan di masa yang akan datang dalam kajian peran *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Sungai Palayangan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dalam penelitian selanjutnya bagi para mahasiswa yang mengambil topik penelitian tentang peran *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata alam di destinasi wisata. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori *stakeholder* yang menjelaskan terkait manajemen perusahaan dalam memenuhi harapan para pemangku kepentingan atau *stakeholder* yang dikemukakan oleh Freeman (1984). *Stakeholder theory* merupakan pemahaman bahwa organisasi dan lingkungannya membentuk suatu sistem yang kompleks dan dinamis, dimana keduanya akan saling memengaruhi. Dalam teori ini memberikan batasan kepada perusahaan untuk memperhatikan kedudukan masing - masing

stakeholder yang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terkait kegiatan yang dilakukan perusahaan.